

Kajian Kelengkapan Adiministrasi dan Farmasetik Resep Pasien IGD di
RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong

Study of Administrative and Pharmaceutical Completeness of Emergency Department
Prescriptions at “JP” Hospital, Sorong Regency

Johan Paulus, Lukman Hardia*

Program Studi Farmasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indoensia

Article Info

Article History

Received: 11 Nov 2025
Revised: 27 Nov 2025
Accepted: 01 Des 2025

ABSTRACT / ABSTRAK

A prescription is a written request from a physician to a pharmacist and serves as a legal and essential medical document, particularly in the Emergency Department (ED), where services must be delivered rapidly and accurately. This study aimed to assess the completeness of administrative and pharmaceutical components of prescriptions issued for ED patients at Dr. J. P. Wanane Regional Hospital, Sorong Regency. A retrospective descriptive design was employed, with total sampling of 2,636 prescription sheets dispensed by the pharmacy department between April and June 2024. The assessment was conducted using 12 administrative components and 6 pharmaceutical components based on the Ministry of Health Regulations No. 58/2014 and No. 73/2016. The findings indicated an overall prescription completeness rate of 71%, consisting of 1,872 complete and 764 incomplete prescriptions. The administrative components with the highest completeness were patient name (100%), prescription date (96%), and physician initials (93.5%). In contrast, the lowest completeness was observed for patient address (0.08%), body weight (1.5%), sex (9.6%), physician registration number (10.3%), and patient age (14.2%). The pharmaceutical components were classified as very good, with 100% completeness in drug name, drug quantity, directions for use, as well as stability and compatibility. However, dosage form (83.9%) and drug strength (85.7%) had not yet reached full completeness. These results demonstrate that the completeness of ED prescriptions still requires improvement, particularly in administrative components.

Keywords: Prescription, Administrative Completeness, Pharmaceutical Completeness, Emergency Department.

Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker yang berfungsi sebagai dokumen medis legal dan krusial, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menuntut pelayanan cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kelengkapan administrasi dan farmasetik pada resep pasien IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong. Penelitian menggunakan desain deskriptif retrospektif dengan total sampling terhadap 2.636 lembar resep yang dilayani instalasi farmasi periode April–Juni 2024. Penilaian dilakukan berdasarkan 12 komponen administrasi dan 6 komponen farmasetik sesuai Permenkes No. 58/2014 dan Permenkes No. 73/2016. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelengkapan resep sebesar 71%, terdiri dari 1.872 resep lengkap dan 764 resep tidak lengkap. Komponen administrasi dengan kelengkapan tertinggi meliputi nama pasien (100%), tanggal resep (96%), dan paraf dokter (93,5%), sedangkan terendah adalah alamat pasien (0,08%), berat badan (1,5%), jenis kelamin (9,6%), SIP dokter (10,3%), dan umur pasien (14,2%). Aspek farmasetik tergolong sangat baik dengan kelengkapan 100% pada nama obat, jumlah obat, aturan pakai, serta stabilitas dan kompatibilitas, meskipun bentuk sediaan (83,9%) dan kekuatan dosis obat (85,7%) belum sepenuhnya lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa kelengkapan resep IGD masih perlu ditingkatkan, terutama pada komponen administrasi.

Kata kunci: Resep, kelengkapan Administrasi, kelengkapan farmasetik, Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Corresponding Author:

Name : Lukman Hardia
Affiliate : Fakultas Farmasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01, Distrik Mariyat Pantai, Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya 98418
Email : lukman@unimudasorong.ac.id

PENDAHULUAN

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker untuk melakukan penyiapan, pengolahan, peracikan hingga penyerahan obat kepada pasien baik dalam bentuk resep kertas maupun elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Made *et al.*, 2021). Resep tidak hanya berfungsi sebagai instruksi terapi, tetapi juga merupakan dokumen legal yang menjadi bukti pertanggung jawaban profesi dokter dan apoteker dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien terkait sediaan farmasi, dengan tujuan menjamin penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan mutu hidup pasien (Menkes RI, 2016). Di rumah sakit, resep menjadi bagian penting dalam pelayanan farmasi klinik, sehingga penyajiannya harus memenuhi kelengkapan administrasi dan farmasetik agar tidak menimbulkan kesalahan pengobatan *medication error* dan pelanggaran hukum.

Kelengkapan resep meliputi dua aspek utama yaitu administrasi dan farmasetik. Kelengkapan administrasi terdiri atas identitas pasien (nama, umur, alamat, jenis kelamin, berat badan) serta identitas dokter penulis resep (nama dokter, nomor Surat Izin Praktik/SIP, alamat praktik, paraf atau tanda tangan, tanggal resep) (Menkes RI, 2016). Sementara itu, kelengkapan farmasetik meliputi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan obat, jumlah obat, aturan pakai, stabilitas, dan kompatibilitas obat (Menkes RI, 2016). Ketidaklengkapan salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang salah, risiko pemberian dosis yang tidak tepat, pemberian obat yang keliru, hingga implikasi hukum bagi tenaga medis dan apoteker yang bertanggung jawab (Annisa, 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan resep masih merupakan masalah di berbagai fasilitas kesehatan. Penelitian oleh (Ismaya *et al.*, 2021) di Rumah Sakit X Kota Depok menemukan bahwa kelengkapan resep narkotika hanya memenuhi 89,16% persyaratan administratif dokter dan 78,64% persyaratan administratif pasien serta 99,76% kelengkapan farmasetik. Penelitian (Ferilda *et al.*, 2022) di RSI Siti Rahmah Padang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun resep narkotika yang lengkap 100%, dengan kekurangan terutama pada penulisan jenis kelamin, berat badan, dan SIP dokter. Sementara itu, (Hardia, 2023) dalam penelitiannya di Apotek “P” Kota Sorong menemukan bahwa kelengkapan resep hanya mencapai 77–80%, dengan bagian terbanyak yang tidak lengkap adalah SIP dokter, berat badan, alamat pasien, dan tanda tangan dokter. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, praktik penulisan resep masih belum sepenuhnya sesuai standar. Kemudian belum adanya penelitian yang berfokus pada IGD sebagai unit berisiko tinggi terhadap kesalahan penulisan resep.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelengkapan administrasi dan farmasetik resep IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong. Penelitian ini difokuskan pada penilaian 12 komponen administrasi dan 6 komponen farmasetik resep sesuai standar Permenkes sehingga dapat menggambarkan kualitas penulisan resep oleh tenaga medis di rumah sakit. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan resep dan kefarmasian di IGD. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan (dokter dan dokter gigi) sebagai penulis resep, serta apoteker sebagai

tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam melakukan skrining resep dan menjamin ketepatan, keamanan, dan legalitas obat sebelum diberikan kepada pasien.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan instansi terkait seperti BPOM dalam penyusunan kebijakan atau pengawasan terkait kepatuhan penulisan resep sesuai standar, guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Kabupaten Sorong dan wilayah sekitarnya.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan retrospektif yang bertujuan untuk menilai kelengkapan administrasi dan farmasetik pada resep IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong. Penelitian dilakukan dengan menelaah dokumen resep yang telah dilayani oleh Instalasi Farmasi IGD pada periode penelitian. Seluruh resep yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai sampel penelitian atau dengan metode total sampling. Berdasarkan hasil penelusuran arsip, jumlah resep yang dianalisis sebanyak 2.636 lembar resep.

Data yang dikaji merupakan resep asli yang berasal dari pasien IGD dan telah diserahkan ke Instalasi Farmasi untuk pelayanan obat. Resep yang dianalisis harus terbaca dengan jelas, mencantumkan identitas dokter dan pasien, serta memiliki informasi terapi obat. Resep yang rusak, tidak terbaca, berasal dari rawat jalan, rawat inap, poliklinik, atau resep permintaan farmasi internal bangsal tidak disertakan dalam penelitian.

Penelaahan resep dilakukan secara langsung dari arsip resep IFRS RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong. Setiap resep diperiksa berdasarkan dua kategori kelengkapan, yaitu administratif dan farmasetik, sesuai dengan standar Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014. Komponen administratif yang dinilai meliputi nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), paraf atau tanda tangan dokter, tanggal penulisan resep, serta identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan alamat atau nomor rekam medis. Sementara itu, komponen farmasetik yang dikaji mencakup nama obat, bentuk sediaan, kekuatan atau potensi obat, jumlah obat, aturan pakai, serta kesesuaian stabilitas dan kompatibilitas obat khususnya pada obat injeksi atau racikan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase kelengkapan setiap komponen yang dinilai. Hasilnya disajikan dalam bentuk narasi dan tabel distribusi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kelengkapan resep. Selain itu, hasil penelitian ini dibandingkan dengan standar yang berlaku serta penelitian terdahulu seperti penelitian oleh (Ismaya *et al.*, 2021), (Ferilda *et al.*, 2022) dan (Hardia, 2023) guna melihat kesesuaian dan perbedaan kondisi kelengkapan resep IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong.

HASIL

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif terhadap data resep pasien IGD yang telah dilayani di Instalasi Farmasi RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong. Pengambilan data dilakukan selama periode April hingga Juni 2024, dengan total 2.636 lembar resep yang memenuhi kriteria inklusi. Seluruh resep tersebut dianalisis menggunakan metode total sampling, dengan penilaian terhadap kelengkapan administratif (12 komponen) dan

farmasetik (6 komponen) sesuai ketentuan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Tabel 1. Tingkat Kelengkapan Resep IGD di RS “JP” Kabupaten Sorong

Kategori Resep	n	%
Resep Lengkap	1.872	71,0
Resep Tidak Lengkap	764	29,0
Total Resep	2.636	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel 1, diperoleh bahwa tingkat kelengkapan resep secara keseluruhan di IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong adalah sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 29% resep masih belum memenuhi satu atau lebih unsur kelengkapan, baik dari aspek administrasi maupun farmasetik.

Tabel 2. Tingkat Kelengkapan Resep IGD Berdasarkan administrasi di RS “JP”

Kategori Resep Persyaratan	Adimistrasi (n=2.636)			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama Lengkap	2.363	100,0	0	0,0
Umur Pasien	373	14,2	2.263	85,8
Jenis Kelamin	253	9,6	2.383	90,4
Berat Badan	39	1,5	2.597	98,5
Tinggi Badan	0	0,0	2.636	100,0
Alamat Pasien	2	0,08	2.634	99,92
Nama Dokter	2.273	86,3	363	13,7
No.SIP dokter	272	10,3	2.636	89,7
Alamat Praktik dokter	0	0,0	0	100,0
No. Hp dokter	0	0,0	0	100,0
Paraf Dokter	2.466	93,5	170	6,5
Tanggal penulisan Resep	2.532	96,0	104	4,0

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 2, kelengkapan administrasi resep IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong masih belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 dan Permenkes No. 58 Tahun 2014. Dan berdasarkan komponen farmasetik pada resep pasien IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong menunjukkan tingkat kelengkapan yang sangat baik (tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Kelengkapan Resep Berdasarkan Farmasetik IGD di RS “JP”

Kategori Resep	n	%
Resep Lengkap	1.872	71,0
Resep Tidak Lengkap	764	29,0
Total Resep	2.636	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2025

PEMBAHASAN

Temuan yang didapatkan adalah rendahnya kelengkapan komponen administratif pada resep IGD, khususnya data kunci seperti berat badan (1,5%), umur (14,2%), dan SIP dokter (10,3%), mengindikasikan masalah sistemik yang kompleks di lingkungan bertekanan tinggi. Faktor utama diduga kuat berasal dari beban kerja IGD yang ekstrem, yang memaksa tenaga medis mengutamakan komponen farmasetik yang langsung berkaitan dengan tindakan penyelamatan nyawa, sementara komponen administratif dianggap sebagai "urusan non-kritis" yang dapat dikorbankan untuk efisiensi waktu (Ferilda et al., 2022; Ulandari et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh kemungkinan sistem rekam medis yang tidak terintegrasi, mengharuskan penulisan ulang data manual yang dianggap sebagai beban ganda (*double work*), serta lemahnya penegakan kebijakan internal dan tidak adanya mekanisme *safety gate* di instalasi farmasi yang memastikan kepatuhan standar (Hardia, 2023);(Ismaya et al., 2021). Konvergensi faktor-faktor seperti; beban kerja, sistem pendukung yang tidak memadai, dan lemahnya akuntabilitas menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kepatuhan, sehingga meningkatkan risiko *medication error* pada populasi rentan dan mengabaikan aspek legal resep sebagai dokumen pertanggung jawaban profesi (Menkes RI, 2014; WHO, 2019).

Analisisa yang dilakukan pada 2.636 lembar resep, yang meliputi kajian kelengkapan administratif yang paling sering dicantumkan adalah nama pasien (100%), tanggal penulisan resep (96%), dan paraf dokter (93,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa dokter masih memperhatikan aspek legal minimal dalam penulisan resep, terutama dalam memastikan adanya identitas pasien dan tanda tangan dokter agar resep dapat diproses secara sah oleh instalasi farmasi. Namun demikian, sebagian besar komponen administratif lainnya menunjukkan tingkat kelengkapan yang rendah. Komponen umur pasien hanya tercantum pada 14,2% resep, sementara jenis kelamin (9,6%), berat badan (1,5%), dan alamat pasien (0,08%) jarang dicantumkan. Padahal, data tersebut sangat penting dalam menentukan dosis obat yang tepat, khususnya pada pasien anak, lansia, penderita gangguan fungsi ginjal, atau pasien dengan kondisi klinis tertentu. Ketidaklengkapan informasi ini dapat meningkatkan risiko *medication error* karena dokter dan apoteker tidak memiliki data pendukung yang cukup untuk memastikan ketepatan dosis. (Khasanah, 2023) Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Ferilda et al., 2022) yang melaporkan bahwa berat badan dan jenis kelamin merupakan komponen yang paling sering tidak dicantumkan pada resep rawat jalan di RSI Siti Rahmah Padang.

Selain itu, kelengkapan identitas dokter penulis resep juga masih kurang optimal. Nama dokter memang tercantum pada sebagian besar resep (86,3%), namun nomor Surat Izin Praktik (SIP) hanya ditemukan pada 10,3% resep, sedangkan alamat dan nomor telepon dokter sama sekali tidak tercantum (0%). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Ismaya et al., 2021) dan (Hardia, 2023) yang juga melaporkan bahwa SIP dokter merupakan salah satu komponen administratif yang paling sering diabaikan dalam penulisan resep. Fakta bahwa sebagian besar resep IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong tidak mencantumkan umur, berat badan, dan SIP dokter mengindikasikan bahwa penulisan resep masih dianggap sebagai kegiatan administratif rutin oleh tenaga medis, bukan sebagai dokumen hukum dan medis yang memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan pasien.

Dari aspek farmasetik, seluruh resep (100%) telah mencantumkan nama obat, jumlah obat, aturan pakai, serta stabilitas dan kompatibilitas obat. Hal ini menunjukkan bahwa dokter dan apoteker telah melaksanakan prinsip dasar *pharmaceutical care*, yaitu memastikan bahwa setiap obat yang diberikan kepada pasien aman, tepat dosis, tepat jumlah, dan sesuai indikasi. Tingginya tingkat kelengkapan pada komponen nama obat dan jumlah obat juga menandakan bahwa proses skrining resep oleh tenaga farmasi berjalan dengan baik. Aspek ini sangat penting, karena ketidakjelasan nama atau jumlah obat merupakan salah satu penyebab utama *medication error* di fasilitas pelayanan kesehatan (Ferilda *et al.*, 2022). Dengan kelengkapan 100% pada komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek farmasetik di IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong telah memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaklengkapan pada komponen bentuk sediaan obat (83,9%) dan kekuatan atau potensi obat (85,7%). Tidak dicantumkannya bentuk dan kekuatan obat secara jelas dapat menimbulkan ambiguitas, terutama untuk obat yang memiliki berbagai bentuk dan variasi dosis, seperti parasetamol (250 mg, 500 mg, atau 1 gram) yang tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, injeksi, maupun sirup. Ketidaklengkapan ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyiapan atau pemberian obat, khususnya pada obat-obatan dengan indeks terapi sempit seperti digoksin, insulin, antikoagulan, dan obat kemoterapi (Ferilda *et al.*, 2022). Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Ismaya *et al.*, 2021) yang melaporkan bahwa meskipun komponen farmasetik seperti nama obat dan aturan pakai cenderung lengkap (>95%), komponen kekuatan dan bentuk sediaan obat sering kali tidak dicantumkan secara rinci. Hal serupa juga ditemukan oleh Hardia (2023) di Sorong, di mana bentuk sediaan dan dosis obat menjadi bagian farmasetik yang paling sering tidak lengkap (Hardia, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kelengkapan resep di IGD RSUD Dr. J. P. Wanane Kabupaten Sorong menunjukkan pola yang tidak seimbang. Secara keseluruhan, hanya 71% resep yang memenuhi standar kelengkapan, sementara 29% lainnya masih memiliki berbagai kekurangan. Aspek farmasetik menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan kelengkapan 100% pada komponen kritis seperti nama obat, aturan pakai, dan jumlah obat. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan aspek administratif yang justru menjadi area masalah serius. Komponen-komponen administratif yang vital untuk keselamatan pasien dan akuntabilitas hukum seperti alamat pasien (0,08%), berat badan (1,5%), dan SIP dokter (10,3%) justru memiliki tingkat kelengkapan terendah.

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya masalah sistemik yang kompleks di lingkungan IGD, dimana tekanan kerja tinggi dan sistem pendukung yang kurang memadai menyebabkan terabaikannya aspek administratif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada potensi meningkatnya risiko kesalahan medis, khususnya dalam penentuan dosis untuk pasien rentan, tetapi juga melemahkan posisi resep sebagai dokumen hukum yang sah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran individu tenaga medis, tetapi lebih pada perbaikan sistem dan kebijakan rumah sakit secara struktural untuk menjamin terpenuhinya standar kelengkapan resep secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifaul Khasanah (2023) Evaluasi Kelengkapan Aspek Administrasi Dan Farmasetik Resep Pasien Di Puskesmas Batu. <https://etheses.uin-malang.ac.id/60819/>
- BPOM RI. 2021. Pedoman Penulisan Resep dan Penggunaan Obat Keras, Narkotika, dan Psikotropika.
- Brimantari, dkk. 2023. Tinjauan Kelengkapan Resep pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Ilmiah Farmasi*.
- Brunton L, et al. 2021. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. Edisi ke-13. McGraw-Hill.
- Ferilda, S. Et Al. (2022) 'Analisis Kelengkapan Administrasi Resep Narkotika Pada Apotek Rawat Jalan Rsi Siti Rahmah Kota Padang Sumatera Barat', 11(2), Pp. 253–262.
- Hardia, L. (2023) 'Evaluasi Kelengkapan Administrasi Resep Narkotika Dan Psikotropika di Apotek "P" Kota Sorong (Evaluation of Complete Administration of Narcotics and Psychotropic Prescriptions at Pharmacy"P", Sorong City)', 05(01), Pp. 18–25. Available At: <https://doi.org/10.30587/herclips.v5i01.5483>.
- Ismaya, N.A. Et Al. (2021) 'Analisa Kelengkapan Resep Narkotika Dan Psikotropika Di Rumah Sakit X Kota Depok', 15(1), Pp. 64–70.
- Made, N. Et Al. (2021) 'Studi Perencanaan Pengadaan Sediaan Farmasi di Apotek X Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016', 11(1), Pp. 1–9.
- Menkes RI, 2016 (2016) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Noer S. 2022. Telaah Resep dan Aspek Legalitas Penulisan Resep di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Legalitas Medik dan Farmasi*
- Rizkiyani N. 2020. Evaluasi Skrining Resep Pasien BPJS di RSAU Lanud Sulaiman Bandung. *Jurnal Farmasi Indonesia*.
- Yani Pratiwi Khusnul Khatima Annisa, F. (2021) 'Evaluasi Kelengkapan Administrasi Dan Farmasetik Resep Pasien Bpjsrawat Jalan Rsudprof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Maret 2021', (72), Pp. 23–29
- Yusuf A, dkk. 2019. Medication Error dalam Pelayanan Resep di Rumah Sakit. *Jurnal Farmasi Komunitas dan Klinik*